

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Multi National Corporation (MNC)/ perusahaan multinasional atau yang sering disebut kalangan lingkup PBB sebagai *Trans National Corporation* merupakan aktor penting dalam ekspansi kapitalisme mutakhir. Persebaran ekspansi kapitalisme sendiri menjangkau hampir semua negara, terutama negara-negara sedang berkembang dan bahkan hampir tidak bisa dihindari kekuatan ekspansinya. Seperti yang diungkapkan oleh Walter S. Jones bahwasanya kaum kapitalis kepentingannya terkait tidak pada kepemilikan tanah tapi pada pabrik, dan dalam sistem kapitalis, kaum borjuis memonopoli kontrol atau mesin, proses perakitan, alat-alat produksi moderen lainnya dan suatu infrastruktur finansial,¹ Maka dari dasar kapitalis itu muncullah perusahaan multinational sebagai suatu kepentingan utamanya yang di situ disebut sebagai “pabrik” dan kemudian dijadikan alat untuk menjalankan ekspansinya ke negara berkembang pada umumnya.

Perusahaan multinsional memiliki definisi yang sangat luas, salah satunya yang dikemukakan oleh *United Nations on Economic and Social Council (UNESCO)* yakni “semua perusahaan yang mengendalikan aset-aset-pabrik-pabrik, tambang-tambang, alat kantor dan sejenisnya didua

¹ Walter S.Jones. Logika Hubungan Internasional Persepsi Nasional.cetakan 1. Jakarta. Penerbit PT Gramedia Pustaka. 1992, hal. 3

negara atau lebih".² Pengertian lainnya juga dikemukakan oleh David H.

Blake dan Robert S. Walters :

*"What is a Multi National Corporation? The definitions vary: some are broad (all firms – industrial; service, and financial-doing international business of all types, within a myriad of organizational structure); others are much narrower, based on size, extensiveness of operation in foreign and managerial orientation"*³

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat diketahui bagaimana suatu perusahaan multinasional datang menjadi sebuah aktor yang berkekuatan besar dalam sistem kapitalis global. Tidak hanya itu, dalam perkembangannya perusahaan multinasional juga kian mendatangkan berlimpah keuntungan untuk negara pusatnya, sehingga berbagai upaya terus dijalankan oleh para negara pemilik modal untuk semakin banyak mengembangkan perusahaan-perusahaannya agar dapat berinvestasi di negara berkembang yang umumnya memiliki banyak sumber daya alam.

Terkait dengan perihal persebaran kapitalisme itu sendiri, perusahaan multinasional dianggap menjadi suatu komponen yang dapat menggiurkan komunitas lokal yang haus akan kekayaan. Pertumbuhan atau perkembangan kapitalisme itu sendiri memerlukan pendanaan atau yang disebut Robert A. Issak sebagai *opportunity cost*, menurutnya pertumbuhan kapitalis juga punya biaya sosial maupun lingkungan.

² Lincoln Arsyad. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi keempat. Hal,190

³ David H.Blake dan Robert S.Walters. *The Political of Global Economic Relations*.hal.76

Kebanyakan efek sosial negatif kapitalisme sudah diketahui. Memang, hal itu terlalu sering diterima begitu saja oleh mereka yang punya “kebiasaan berfikir kapitalis” dan terlalu sering diremehkan oleh masyarakat negara berkembang yang lapar kemewahan materi negara barat.⁴

Sebuah perusahaan multinasional yang menjadi salah satu contoh agen kapitalis di negara berkembang, seperti Indonesia adalah *Freeport-McMoran Copper & Gold Inc (FCX)* yang berasal dari negara adidaya dunia yakni Amerika Serikat. Di Indonesia MNC ini membuka cabangnya yakni PT. Freeport Indonesia (PTFI) yang beroperasi di Papua. PTFI telah beroperasi sejak tahun 1967, di mana kegiatan utama perusahaan ini adalah eksplorasi tambang batu bara, tembaga, emas, dll.

Globalisasi sosial ekonomi yang dinilai searah dengan persebaran kapitalisme global yang diyakini sebagai satu-satunya jalan menuju kesejahteraan dunia dan umat manusia.⁵ Keberadaan PTFI di Indonesia apakah telah sepenuhnya membawa tujuan utama tersebut, ternyata tidak sepenuhnya terbukti dan justru menimbulkan banyak dampak yang merugikan sebagian kondisi lokal.

Fenomena ini tidak terlepas dari kapitalisme global yang berambisi menguasai dunia. Pada akhirnya permasalahan yang terjadi di negara-negara berkembang adalah sebagai dampak dari kapitalisme itu sendiri. Kapitalisme datang dari negara-negara maju yang pada umumnya beraksi

⁴ Robert A. Issak. *Ekonomi Politik Internasional*. Yogyakarta. PT.Tiara Wacana Yogya. 1995, Hal.178

dengan upaya investasi di negara berkembang, namun pada faktanya pihak yang paling diuntungkan dari kerjasama kedua belah pihak itu tidak seimbang. Pada kenyataannya negara maju lebih diuntungkan dibanding negara berkembang yang kemudian meninggalkan problematika yang semakin membawa keterpurukan bagi negara berkembang.

Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? tentunya perlu dipahami kondisi internal di dalam negara berkembang. Secara umum, karakteristik negara berkembang dapat diklasifikasikan menjadi tujuh kategori utama sebagai berikut:

1. Standar hidup yang relatif rendah, sebagai akibat dari tingkat pendapatan yang rendah, ketimpangan pendapatan yang parah, kurang memadainya pelayanan kesehatan dan system pendidikan.
2. Tingkat produktifitas yang rendah.
3. Tingkat pertumbuhan penduduk serta beban ketergantungan yang tinggi.
4. Angka pengangguran, terbuka maupun terselubung, yang sangat tinggi dan akan terus bertambah tinggi, sementara penyediaan lapangan kerja semakin terbatas.
5. Ketergantungan pendapatan yang sangat besar pada produksi sektor pertanian serta ekspor produk-produk primer (bahan-bahan mentah).

7. Dominasi, ketergantungan, dan kerapuhan yang parah pada hampir semua aspek hubungan internasional.⁶

Ketujuh poin di atas menunjukkan betapa kuatnya indikasi akan bergantungnya negara-negara berkembang kepada pihak eksternal untuk memacu kehidupan pembangunan ekonominya. Pihak eksternal yang dinilai menjadi dewa penyelamat kondisi ekonomi negara berkembang. Unsur yang paling menonjol salah satunya yakni perusahaan multinasional yang terkait erat dengan sistem penanaman modal atau investasi.

Ada sebuah argumen yang menyatakan bahwa sebenarnya perusahaan-perusahaan multinasional tidak mensubsitisi perusahaan-perusahaan tingkat nasional.⁷ Dari argumen tersebut dapat dilihat bahwa sekiranya MNC seperti PTFI pada umumnya hanya menguntungkan pribadi perusahaannya dan negara tempat ia berasal, sehingga tidak cukup membawa pengaruh yang signifikan bagi pertumbuhan perusahaan lokal nasional lainnya namun justru menjadi sebuah raksasa pendominasi sektor tertentu.

Banyak asumsi yang mengacu pada konsep bahwa globalisasi adalah mitos, dan yang sebenarnya adalah persebaran kapitalisme itu sendiri. Menurut Hirst dan Thomson salah satu pendapatnya menyatakan perusahaan transnasional (TNC, *transnational company*) yang murni jarang ditemukan. Perusahaan transnasional pada umumnya berbasis

⁶ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonom di Dunia Ketiga*, cetakan 1, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1998, hal. 45-46

negara nasional dan kegiatan perdagangannya diberbagai belahan dunia bertumpu pada kekuatan produksi dan pemasaran dilokasi nasional. Dan tidak ada kecenderungan ke arah perkembangan perusahaan internasional murni.⁸

Hal ini sesuai dengan kondisi yang terjadi pada keberadaan PTFI di Indonesia. Sebagai MNC, PTFI hanya berorientasi kepada kepentingan nasional negara asalnya. Maka sewajarnya jika Amerika Serikat sebagai negara induk PTFI menjadi semakin beradi daya dan adi kuasa di tengah lingkungan global.

Selain itu, masih menurut Hirst dan Thomson bahwa lalu lintas modal tidak mengakibatkan berpindahnya penanaman modal dan kesempatan kerja secara besar-besaran dari negara maju ke negara berkembang. Sebaliknya, penanaman modal asing (FDI: *Foreign Direct Investment*) justru banyak terpusat di negara-negara industri maju, sedangkan Dunia Ketiga—kecuali segetintir negara industri baru— tetap memempati posisi pinggiran, baik dari sisi investasi maupun perdagangan.⁹

Ini membuktikan bahwa kapitalisme dalam persebarannya tidak memberikan semaksimal mungkin dampak perkembangan terhadap negara berkembang seperti Indonesia. Yang muncul kemudian hanyalah sentralisme keuntungan bagi negara maju.

Mohtar Mas'ood berpendapat hampir semua negara dunia ketiga sekarang mengalami penetrasi mendalam oleh, dan sangat tergantung pada, negara-negara industri maju (atau negara-negara "pusat" dan terutama ekonomi dunia. Penetrasi itu bisa terjadi melalui berbagai cara, ekonomi, politik dan kultural, dan pada berbagai periode perkembangan suatu negara.¹⁰

Penguasaan agen besar persebaran kapitalisme global yang terwujud dalam bentuk MNC kian meluas di negara sedang berkembang. Perusahaan-perusahaan milik asing ini kian menjadi raksasa yang menguasai perekonomian nasional negara berkembang. Faktor utama adalah kekayaan alam yang melimpah yang dapat dieksplor setiap saat.

Selanjutnya, keberadaan masuknya investasi asing dengan berdirinya perusahaan-perusahaan multinasional seperti PTFI di dalam negeri, membuat Indonesia semakin masuk kedalam kondisi yang dilematis. Ada dua hal yang menonjol menampakkan diferensiasi dampak yang ditimbulkan khususnya bagi kepentingan nasional dan komunitas lokal.

Hal seperti ini sudah berlangsung lama di Indonesia, dan kondisi ini tidak terlepas bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pihak pemerintah dalam menanggapi kenyataan yang ada. Menurut mantan Ketua MPR RI Amien Rais, bangsa Indonesia mengalami krisis kemandirian dan kepercayaan diri. Ini tercermin dari sejumlah kebijakan

dalam maupun luar negeri yang terkesan lebih mengakomodasi kepentingan negara-negara asing pemilik modal ketimbang masyarakatnya sendiri.¹¹

Kembali melihat wacana yang terjadi dalam realita kondisi keberadaan PTFI sebagai perusahaan multinasional di tengah komunitas lokal Papua. Di wilayah bagian timur Indonesia ini, PT. Freeport Indonesia (PTFI) di bawah naungan *Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc (FCX)* yang berpusat di Amerika Serikat, merupakan perusahaan yang bergerak dibidang eksplorasi hasil tambang, berdiri di tanah Papua sejak tahun 1967. Tepatnya pada tanggal 7 April 1967 terjadi penandatanganan Kontrak Karya pertama antara PTFI dengan Pemerintah Indonesia. Kontrak karya ini menjadi dasar hukum bagi PTFI untuk melakukan penambangan di *Ertzberg* (gunung bijih) dan semua lokasi bijih tambang lainnya didalam radius 10 Km persegi dari *Ertzberg*. Jangka waktu kontrak adalah 30 tahun sejak proyek mulai beroperasi.

Perusahaan ini diawali dengan adanya sebuah penelitian atau ekspedisi yang dilakukan oleh Colijn, termasuk Jean-Jacques-Dozy, yang mencapai *glester* Gunung Jayawijaya dan menemukan "*Ertzberg*" atau Gunung Bijih pada bulan Desember 1936. Kemudian berita ini sampai kepada pihak *Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc* di AS, sehingga mereka kembali melakukan ekspedisi PTFI yang diketuai Forbes Wilson

¹¹ *Kompas*, 8 April 2007 (Kolom Umum)

dan Del Flint dan berhasil menemukan kembali *Ertsberg* tepatnya pada Juni 1960.¹²

Dalam perkembangannya, kedatangan PTFI membawa cukup banyak dampak yang signifikan terhadap kehidupan komunitas lokal di Papua maupun pihak nasional negara. Yang menjadi subyek utama penerima pengaruh atas keberadaan PT. Freeport tentunya adalah komunitas lokal, hal ini terkait dengan hak ulayat dan tanggungjawab sosial atas berdirinya sebuah perusahaan disuatu daerah. Pihak PTFI mengemukakan “Dalam rangka melanjutkan komitmen kami untuk membangun dan memelihara hubungan konstruktif dan positif dengan masyarakat Papua, kami menjalin dialog yang berkesinambungan dengan para tokoh setempat. Dialog tersebut telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan penting bersama masyarakat Amungme dan Kamoro. PTFI juga telah membentuk dana-dana perwalian bagi masyarakat Amungme dan Kamoro”¹³

Amungme dan Kamoro merupakan dua suku utama yang hidup di tanah ulayat¹⁴ yang akhirnya menjadi wilayah konsesi Freeport. Mereka hidup dengan kebiasaan subsistensi yang signifikan secara spiritual di luar daerah. Sebagian dari Amungme (dataran tinggi) hidup di sekitar Waa Valley di mana perusahaan Tembapura dioperasikan. Mereka menggunakan wilayah di sekitarnya untuk berburu dan menanam sayur-sayuran. Orang Amungme yang lain hidup di dua wilayah yang berdekatan

¹² <http://www.ptfi.com> diakses tanggal 5 Januari 2007

¹³ *Ibid* diakses tanggal 5 September 2007

¹⁴

dengan dataran rendah Tsinga dan Arwanop. Kamoro (dataran rendah) berdiam di daerah Timika dan di wilayah perusahaan Kwala Kencana. Saat pendirian pusat Freeport pada 1967, Amungme dan Kamoro diorganisir ke dalam desa yang berdasarkan pada klan sosial dan struktur pemerintahan dengan menyertakan tanah di daerah tropis hutan hujan, gunung es, dan tepi sungai. Mereka mempraktekan ekonomi subsistensi berdasar pada pertanian berkelanjutan dan produksi hutan, dan memancing, dan berburu.¹⁵

Kedua suku atau yang dalam skripsi ini akan lebih sering dinamakan sebagai komunitas lokal inilah yang akan menjadi sorotan utama pihak yang merasakan dampak dari berdirinya PTFI di tanah mereka. Disamping ada tujuh suku lain termasuk Amungme dan Kamoro yakni Dani Lani, Moni, Ekari, Ndagua, dan Damal.

Pada awalnya banyak komitmen-komitmen yang dibangun antara pihak PTFI dengan masyarakat Papua terutama masyarakat Amungme dan Kamoro. Hal ini ditujukan untuk dapat dijadikan sebagai stabilisator hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat. Dalam situsnya pihak PTFI menjelaskan adapun nota kesepahaman (*Memorandum Of Understanding/MOU*) yang ditandatangani pada tahun 2000 antara lembaga masyarakat Amungme dan Kamoro dengan PTFI, menekankan perhatian pada permasalahan sumber daya, sosial, ekonomi, hak asasi manusia, hak ulayat serta lingkungan hidup. Kesepakatan bersejarah yang

dicapai melalui negosiasi selama lima tahun tersebut, berhasil mendorong adanya dialog berkesinambungan guna meningkatkan saling pengertian dan penghargaan sehingga memungkinkan masyarakat setempat mewujudkan aspirasinya serta memelihara kelangsungan hubungan yang harmonis.¹⁶

Selanjutnya masih dari sudut pandang kondisi komunitas lokal Papua, manfaat yang diperoleh dari PTFI juga telah terwujud dalam beberapa bidang, baik dari segi sosial, pendidikan, kesehatan dan sarana infrastruktur yang lain. Namun pemerataan kembali menjadi permasalahan yang selalu mencuat ke permukaan, sehingga masih banyak juga komunitas lokal yang lebih dirugikan atas keberadaan PTFI di daerah mereka.

Memang merupakan sebuah ironi ketika sebuah daerah yang kaya sumber alam, justru komunitas lokal daerah tersebut tidak banyak mendapatkan keuntungan dan manfaat yang berarti bagi kehidupan mereka. Sebaliknya, pihak asing yang datang dengan membawa keunggulan kemampuan pengelolaan dan eksplorasi yang lebih canggih, menjadi pihak yang diuntungkan bahkan bisa dikatakan sebagai penguasa atas kekayaan alam itu.

Cecep Darmawan berpendapat kasus PTFI adalah salah satu fenomena ketidakadilan yang sudah sekian lama dipertontonkan di tanah Papua. Ini pula yang membuktikan bahwa hadirnya PTFI dengan mesin

batuan dari PTFI ke danau itu, sehingga air dan aliran sungainya mengalami pencemaran karena mengandung zat senyawa besi sulfida dan tembaga sulfida, limbah batuan ini juga merupakan limbah B3 karena mengandung logam berat yang pada umumnya masuk kategori limbah toksik kronis yang sangat berbahaya jika air yang sudah tercemar zat-zat itu dikonsumsi oleh manusia.¹⁹

Danau Wanagon memiliki peranan penting bagi kehidupan masyarakat Amungme yang hidup di sekitarnya. Air Danau Wanagon mengalir menjadi Sungai Wanagon, di mana masyarakat Amungme menggunakannya untuk keperluan sehari-hari seperti untuk minum, masak, mandi, dll. Bukan hanya itu danau ini juga menyimpan nilai religius bagi masyarakat Amungme. Sehingga ketika danau ini telah tercemar banyak kerugian yang diderita masyarakat Amungme.

Dari semua hal yang dipaparkan, maka telah menjadi suatu gambaran kondisi beberapa dampak yang ditimbulkan dari keberadaan sebuah perusahaan multinasional terhadap kehidupan sebuah negara, khususnya bagi komunitas lokal di mana perusahaan itu berdiri, beserta gambaran mengenai paham pemikiran yang melandasi fenomena ini. Maka secara garis besar skripsi ini akan memaparkan mengenai bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh interaksi PT.Freeport Indonesia terhadap komunitas lokal di Papua.

B. Pokok Permasalahan

Dari pembahasan yang dikemukakan maka yang ingin diangkat dalam skripsi ini sebagai pokok permasalahan adalah “bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan PTFI terhadap kehidupan komunitas lokal di Papua”

C. Kerangka Berfikir

1. Teori Ketergantungan (Dependensia)

Teori dependensia lahir dari kondisi pembangunan dinegara-negara dunia ketiga (negara sedang berkembang) termasuk Indonesia. Menurut Bjorn Hettne pendekatan “ketergantungan” (*dependencia*) menjadi bagian dari orientasi strukturalistik umum dalam teori pembangunan yang juga dipelopori oleh beberapa ahli ekonomi pembangunan di dunia pertama.²⁰

Pendapat lain mengenai teori ketergantungan juga diungkapkan oleh Andre Gunder Frank, yang oleh Arief Budiman dalam bukunya Teori Pembangunan Dunia Ketiga dikategorikan kedalam Teori Ketergantungan Klasik. Frank pada intinya menyebutkan Teori Dependensia merupakan sebuah pembangunan keterbelakangan, dalam bukunya yang sangat berpengaruh, *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*, Frank mengatakan: “Saya percaya, bersama Paul Baran, bahwa kapitalisme, baik yang global maupun yang nasional, adalah faktor yang telah menghasilkan

keterbelakangan dimasa lalu dan yang terus mengembangkan keterbelakangan dimasa sekarang”.²¹

Dalam teori dependensia sangat menonjol sifat ketergantungan dari negara berkembang terhadap negara maju untuk membantu pembangunan dalam negerinya. Lebih lanjut, Frank dalam teorinya mengembangkan tentang konsep negara pusat dan negara pinggiran, yang disebutnya sebagai negara metropolis dan negara satelit. Dalam hal ini Frank mengkonsentrasikan kepada arah mengenai aspek politik dari hubungan yang ada, yakni hubungan politis (dan ekonomi) antara modal asing dengan klas-klas yang berkuasa dinegara-negara satelit.

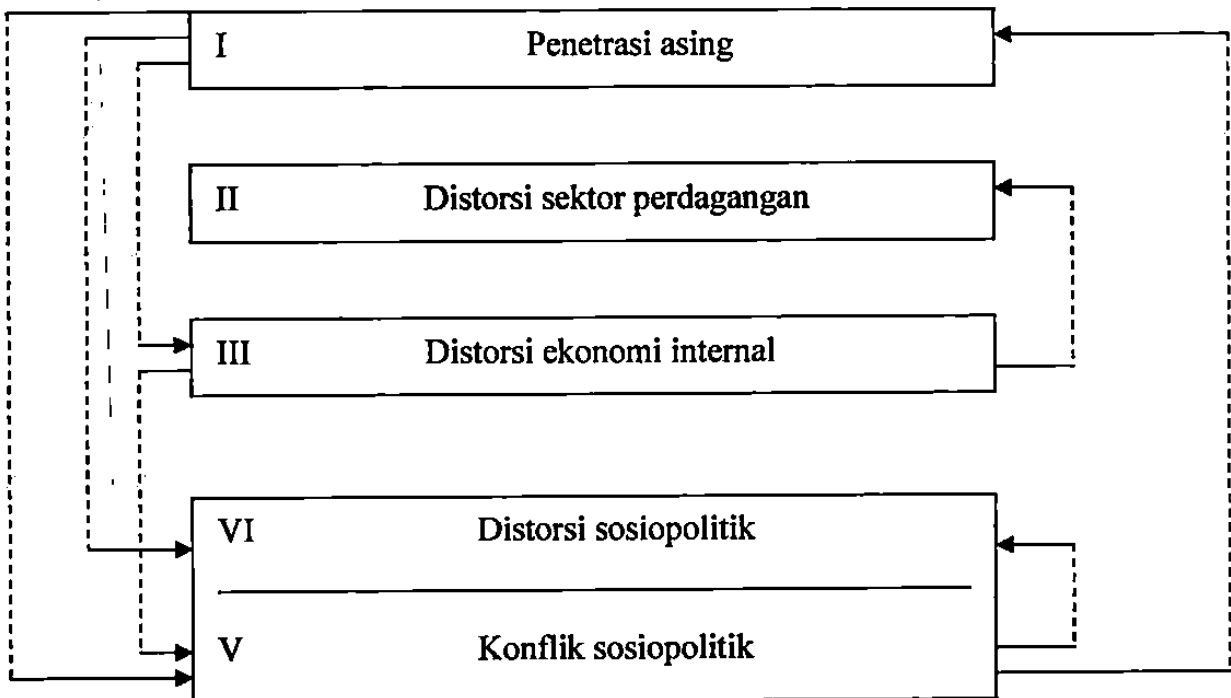
Pada teori Frank jelas ada tiga komponen utama: (1) modal asing, (2) pemerintah lokal di negara-negara satelit, dan (3) kaum borjuasinya. Pembangunan hanya terjadi dikalangan mereka. Sedangkan rakyat banyak, yang menjadi tenaga upahan, dirugikan. Maka ciri-ciri perkembangan kapitalisme satelit adalah: (1) kehidupan ekonomi yang tergantung, (2) terjadinya kerjasama antara modal asing dengan klas-klas yang berkuasa di negara-negara satelit, yakni para pejabat pemerintah, klas tuan tanah dan pedagang, dan (3) terjadinya ketimpangan antara yang kaya (klas yang dominan yang melakukan eksploitasi) dan yang miskin (rakyat jelata yang dieksploitir) di negara-negara satelit.²²

Mochtar Mas, oed dalam bukunya Ilmu Hubungan Internasional- Disiplin dan Metodologi menyimpulkan bahwa inti dari teori dependensia

bisa diringkas sebagai berikut: Penetrasi asing dan ketergantungan eksternal menyebabkan timbulnya distorsi besar-besaran dalam struktur ekonomi “pinggiran” (*periphery*), yang pada gilirannya menimbulkan konflik sosial yang gawat dan akhirnya mendorong timbulnya penindasan negara terhadap rakyat dimasyarakat yang tergantung itu.²³

Gambar 1

Model Sederhana Teori Ketergantungan



Sumber: Raymond Duvall, at, all “A Formal Model of Dependencia Theory: Structur and Measurement”, dalam R Morrit dan B.Russett (Eds) *From National development to Global Community* (Allen & Urwin, 1981), dalam Mochtar Mas’oed Disiplin dan Metodologi hal. 206

Bagan di atas menjelaskan mengenai komponen-komponen utama yang ada dalam bahasan pemikiran teori dependensia. Penetrasi asing

merupakan komponen utama yang menyebabkan timbulnya suatu kondisi ketergantungan, hal ini akan berujung pada munculnya berbagai konflik sosial politik, ekonomi, maupun budaya.

Pemahaman inilah yang juga telah terjadi di tengah komunitas lokal Papua pada khususnya dan Indonesia pada umumnya yang memiliki ketergantungan terhadap keberadaan PTFI sebagai wujud penetrasi asing dan pihak eksternal.

PTFI telah memberikan banyak pengaruh yang signifikan bagi komunitas Papua dan Indonesia terutama dari segi ekonomi. Kekuatan kapitalistiknya telah menyebabkan sebagian komunitas lokal Papua menggantungkan kehidupannya ditangan PTFI sebagai pihak asing yang berkuasa di tengah limpahan kekayaan sumber alam di tanahnya sendiri.

Sumbangan devisa untuk Indonesia sendiri juga tidak dapat diremehkan pengaruhnya. Walaupun nilai yang didapatkan Indonesia tidak sebanding dengan keuntungan yang dikeruk dari tanah Papua oleh PTFI. Hal ini tentunya dikarenakan kondisi Indonesia sebagai negara sedang berkembang yang masih membutuhkan banyak pendanaan dan masih minim kemampuan untuk dapat mengolah sendiri kekayaan alamnya.

2. **Konsep *Dual Society***

Konsep *dual society* (masyarakat mengganda) lahir dari pandangan teori ketergantungan. Konsep ini menunjukkan adanya jurang pemisah

diantara orang-orang kaya dan miskin pada pada berbagai tingkatan disetiap negara.²⁴

Dalam konsep *dual society* dilandasi adanya gagasan adanya atau sebuah dunia bermasyarakat ganda (*a world of dual society*) yakni merupakan pandangan yang melihat dunia terbagi kedalam dua kelompok besar, yakni negara-negara kaya dan yang miskin. Di negara kaya memang masih ada sebagian penduduknya yang miskin dan sebaliknya dinegara-negara miskinpun ada penduduknya yang makmur sejahtera.²⁵

Dengan kerangka konsep *dual society* ini, maka dapat menjelaskan suatu kondisi dampak yang dirasakan komunitas lokal Papua atas kehadiran PTFI di tanah mereka. Konsep masyarakat mengganda merupakan sebuah cermin yang dapat digunakan untuk melihat dengan fakta yang terjadi di tengah kondisi masyarakat Papua. Tidak semua dari mereka ikut menikmati imbas kemakmuran yang didatangkan oleh keberadaan PTFI di daerahnya, bahkan mereka justru hanya menjadi korban dari semakin habisnya sumber alam yang dikeruk terus menerus oleh pihak eksternal itu.

Terdapat empat elemen kunci yang menjadi dasar utama terbentuknya sebuah dualisme dalam kondisi suatu masyarakat atau negara. Pertama, adanya elemen superior sekaligus elemen inferior, dimana keduanya saling hadir secara bersamaan (atau berkoeksistensi)

²⁴ S. H. ...
²⁵ ...

dalam waktu dan tempat yang sama, kedua; koeksistensi yang bersifat baku, permanen atau kronis, ketiga; kadar superioritas sekaligus inferioritas cenderung meningkat, keempat; hubungan saling keterkaitan antar elemen tidal seimbang, superior tidak membawa banyak manfaat terhadap elemen inferior, ini menunjukkan prinsip *trickle down effect* itu sesungguhnya sulit diterima.

Aplikasi konsep *dual society* benar-benar dapat terlihat pada realita yang terjadi dalam kehidupan komunitas lokal Papua atas kedatangan Dari satu sisi memang terjadi adanya kondisi yang membaik dari kehidupan sebelumnya dalam kehidupan komunitas lokal Papua, namun hal ini ternyata hanya dirasakan oleh segelintir komunitas lokal Papua. Hal ini datang dari program rekognisi PTFI, program ini merupakan wujud penghargaan PTFI terhadap adanya 'hak ulayat' wilayah setempat, hak ulayat ini adalah hak atas tanah yang belum dikelola merupakan hak masyarakat adat daerah setempat. Sehingga PTFI mengadakan program rekognisi tersebut, yang menjadi awal bagi masyarakat desa Amungme dan Kamoro (desa terdekat dari pusat *Ertzberg* tempat eksplorasi PTFI) dalam merasakan manfaat keberadaan PTFI.

Program rekognisi tersebut diwujudkan dalam dua program rekognisi jangka panjang yang saat ini tengah dijalankan di daerah dataran tinggi dan dataran rendah pada wilayah operasi PTFI. Kedua program rekognisi tersebut menyediakan proyek-proyek pengembangan prasarana,

gedung sekolah dan asrama pelajar, klinik kesehatan, tempat ibadah, bangunan sarana umum, gedung perkantoran, jalan, jembatan, tangki air bersih, listrik, perahu motor untuk angkutan air dan perikanan, sarana olah raga, serta studi kelayakan peluang bisnis.²⁶

Dampak keuntungan lain yang memang dirasakan sebagian komunitas lokal Papua yakni terkait dengan bidang pendidikan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pihak PTFI telah memberikan sumbangsih yang cukup besar. Pelatihan pendidikan berkelanjutan dan pengembangan merupakan komponen yang sangat penting guna menjamin efisiensi operasional jangka panjang pada setiap usaha. Hal tersebut menjadi kian kritis ketika beroperasi pada daerah berkembang yang tidak mempunyai sejarah panjang program pendidikan tinggi. Program pelatihan kerja di Papua perlu menyediakan lebih dari sekedar pengembangan keahlian teknis. PTFI menyediakan jumlah jam pelatihan di dalam ruang kelas maupun di tempat kerja lebih banyak dibanding kebanyakan dibanding Perguruan Tinggi. Program-program pelatihan tersebut berkisar dari program pelajaran dasar baca tulis dan berhitung hingga program "pramagang" bagi orang-orang yang belum pernah mengikuti pelatihan kerja, pemagangan keahlian teknis tingkat lanjut, pengembangan jenjang karir dan kepemimpinan, serta program pengelolaan usaha yang mengajarkan keterampilan kelas dunia bagi para pekerja kami.

Di tahun 1996, PTFI bertekad untuk melakukan peningkatan signifikan pada program pelatihan dan pendidikan yang dimilikinya yang memang sudah cukup agresif. Perusahaan berjanji untuk melipatgandakan jumlah tenaga kerja asal Papua hingga tahun 2001, dan selanjutnya melipatgandakan jumlah itu kembali hingga tahun 2006. Perusahaan juga berjanji untuk meningkatkan jumlah karyawan asal Papua yang menduduki posisi manajemen dan profesional setidaknya dua kali lipat. Kedua sasaran tersebut tengah dicapai dan lebih lanjut, perusahaan pun berkomitmen untuk mencapai kemajuan dalam menyediakan peluang pekerjaan dan manajemen bagi warga asal Papua. Dalam rangka pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) warga asal Papua, pada tahun 2003 PTFI mendirikan Institut Pertambangan Nemangkawi (*Nemangkawi Mining Institute*). Sasaran institut tersebut adalah menyediakan peluang program pra-magang, magang serta pengembangan lanjut jenjang karir bagi ratusan warga Papua setiap tahunnya.²⁷

Beranjak kepada sisi lain dari kondisi komunitas lokal Papua, yang mengalami dampak buruk terhadap keberadaan PTFI di wilayah mereka. Hal ini terkait erat dengan kebijakan pemerintah RI pada saat kontrak karya mulai disetujui (saat itu masih Presiden Soeharto).

Masuknya *Freeport Mc Moran Gold & Copper Inc* di Papua sejak tahun 1967 merupakan awal penistaan dan represi tak berkesudahan oleh kaum pemilik modal sekaligus TNI sebagai kekuatan kolaborator modal

²⁷ *Log.cit* diakses tanggal 22 Juli 2007

asing terhadap rakyat Papua. Sejak melakukan operasi penambangan di Papua, Freeport telah mengeruk ratusan milyar dolar AS ke pundi-pundi kekayaan mereka di Amerika maupun ampas-ampasnya yang dibagikan kepada kroni Soeharto dan TNI di Jakarta.

Fakta seperti inilah yang menjadi cerminan akan adanya berbagai tindakan yang mengorbankan komunitas lokal. Mereka pihak eksternal hanya mementingkan tujuan utama mereka, dan ironisnya lagi justru para elit pemerintahan negara kita juga terlibat di dalamnya.

D. Hipotesa

Keberadaan PTFI di Papua telah membawa dampak besar terhadap pembangunan komunitas lokal Papua, berupa;

- Terjadinya *dual society* di tengah kehidupan komunitas lokal Papua, dan
- Ketergantungan yang berkelanjutan dari komunitas lokal terhadap perusahaan multinasional yakni PT. Freeport Indonesia.

E. Metode Pengumpulan Data

Penulisan skripsi ini menggunakan dasar metode studi kepustakaan (*library research*) dalam upaya pengumpulan datanya. Berbagai data dari

... dan sumber internet dijadikan sebagai

F. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini ditampilkan dalam lima bab, yakni meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II AWAL KONTRAK KARYA PTFI DI PAPUA

Dalam Bab ini dibahas mengenai Ekspedisi Dr. Jean Jacques Dozy dan Dr. A.H Collijn, serta proses terbentuknya kontrak karya PTFI dengan pihak pemerintah Indonesia.

BAB III KEHADIRAN PTFI BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Bab ini akan membahas mengenai pertumbuhan Perusahaan Multinasional di Indonesia, menguatnya peranan swasta dalam sistem perekonomian Indonesia serta kontribusi PTFI bagi perekonomian Indonesia.

BAB IV IMPLIKASI PTFI TERHADAP KOMUNITAS LOKAL

Dalam bab ini akan ditulis tentang *dual society* sebagai dampak PTFI yang terjadi di lingkungan komunitas lokal Papua, dan terbentuknya ketergantungan komunitas lokal terhadap PTFI, serta dampak ekologi di sekitar wilayah eksplorasi PTFI.

BAB V KESIMPULAN